

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran kelembagaan Koperasi Citra Alam Mandiri dan BUMDes Cisantana dalam pengelolaan Objek Wisata Curug Putri Palutungan, Kabupaten Kuningan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pembagian tugas dan fungsi kelembagaan** dalam pengelolaan Objek Wisata Curug Putri Palutungan menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dan terstruktur. Koperasi Citra Alam Mandiri berperan sebagai pengelola utama destinasi wisata berdasarkan izin resmi dan kemitraan dengan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Koperasi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional wisata, yang meliputi pengelolaan tiket masuk, pemeliharaan fasilitas, pengelolaan sumber daya manusia, serta pelaksanaan evaluasi pengelolaan secara berkala. Sementara itu, BUMDes Cisantana tidak berperan sebagai pengelola utama destinasi wisata, melainkan menjalankan fungsi pendukung, khususnya dalam pengelolaan kebersihan dan pengangkutan sampah di kawasan wisata Curug Putri Palutungan.
2. **Bentuk kolaborasi antara Koperasi Citra Alam Mandiri dan BUMDes Cisantana** bersifat terbatas dan fungsional, dengan fokus utama pada kerja sama di bidang pengelolaan lingkungan, khususnya pengangkutan sampah. Kolaborasi ini telah berjalan sejak tahun 2020 dan dilaksanakan secara rutin melalui sistem pengangkutan sampah yang terjadwal. Namun demikian, kerja sama tersebut belum didukung oleh perjanjian kerja sama formal (MoU) yang mengatur pembagian peran secara lebih rinci, kontribusi ekonomi, maupun mekanisme bagi hasil terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga kolaborasi belum berkembang menjadi kemitraan ekonomi yang terintegrasi.

3. **Tingkat keberhasilan peran kedua lembaga** dapat dinilai cukup baik sesuai dengan kewenangan masing-masing. Koperasi Citra Alam Mandiri dinilai berhasil dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan operasional wisata serta memenuhi kewajiban kelembagaan kepada pihak TNGC. Di sisi lain, BUMDes Cisantana berhasil menjalankan perannya dalam mendukung kebersihan dan pengelolaan lingkungan kawasan wisata melalui sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal optimalisasi kontribusi ekonomi sektor pariwisata terhadap desa serta pengembangan pengelolaan sampah sebagai unit usaha desa yang berorientasi pada keberlanjutan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran kelembagaan Koperasi Citra Alam Mandiri dan BUMDes Cisantana dalam pengelolaan Objek Wisata Curug Putri Palutungan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi Koperasi Citra Alam Mandiri**, disarankan untuk memperkuat kerja sama kelembagaan dengan Pemerintah Desa Cisantana dan BUMDes Cisantana melalui penyusunan perjanjian kerja sama (MoU) yang jelas dan formal. Keberadaan MoU tersebut diharapkan dapat mengatur pembagian peran, mekanisme kontribusi ekonomi, serta skema bagi hasil yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu, penguatan kerja sama ini juga penting untuk memperkuat legitimasi sosial pengelolaan wisata yang sejalan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat.
2. **Bagi BUMDes Cisantana**, disarankan untuk mengembangkan pengelolaan sampah tidak hanya sebagai bentuk pelayanan lingkungan, tetapi juga sebagai unit usaha desa yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti mesin pengolahan

atau insinerator, serta peningkatan kapasitas manajemen dan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, pengelolaan sampah berpotensi memberikan kontribusi ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan wisata.

3. **Bagi Pemerintah Desa Cisantana dan pihak terkait**, diharapkan dapat berperan aktif dalam memfasilitasi sinergi antar lembaga pengelola wisata dan lembaga desa. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan regulasi pendukung, pendampingan kelembagaan, serta penguatan kerja sama multipemangku kepentingan, termasuk dengan pihak pengelola kawasan konservasi, dalam rangka mewujudkan pengelolaan wisata alam yang berkelanjutan di kawasan desa wisata.
4. **Bagi peneliti selanjutnya**, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam aspek keberlanjutan ekonomi dan lingkungan dalam pengelolaan wisata alam, serta mengeksplorasi model kolaborasi kelembagaan yang lebih integratif antara pengelola wisata, BUMDes, dan pemerintah desa dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat.